

## **PARTISIPASI POLITIK : PERBANDINGAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN NEGARA OTORITER**

Dina Fadiyah, Antonius Jeremias Beso  
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945  
Jalan Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara

Email: [dinafadiyah14@hotmail.com](mailto:dinafadiyah14@hotmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini ingin melihat bagaimana perbandingan partisipasi politik di Negara demokrasi dan Negara otoriter. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting akhir-akhir ini, karena berkaitan dengan perkembangan negara-negara berkembang. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam negara Demokrasi maupun Negara Otoriter. Dengan menggunakan teori partisipasi politik, semoga tulisan ini bisa menjawab terkait perbandingan partisipasi politik dalam Negara demokrasi dan Negara otoriter.

**Kata kunci : partisipasi politik, perbandingan politik, demokrasi**

### **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>1</sup>

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting pada akhir-akhir ini, banyak dipelajari orang terutama dalam kaitannya dengan perkembangan negara negara berkembang. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam negara Demokrasi maupun Negara Otoriter. Walaupun dalam Negara otoriter partisipasi politik tidak terlalu penting bagi pemerintahannya, dari sini perbandingan partisipasi politik dalam Negara demokrasi dan Negara otoriter akan dibahas.

---

<sup>1</sup>A. Rahman.2007. *Sistem Politik Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta), hlm.285.

Secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (*countacting*).<sup>2</sup>

## **PARTISIPASI POLITIK**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua : mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>3</sup>

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik:

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya hubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.

---

<sup>2</sup> Budiarto Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia: Jakarta), hlm.368

<sup>3</sup> Affan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), hlm. 182

5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (Konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>4</sup>

### **PARTISIPASI POLITIK DI NEGARA DEMOKRASI (INDONESIA)**

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frakuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktifis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Beralih ke profil partisipasi, memperoleh data partisipasi di negara-negara berkembang ternyata tidak mudah, tambahan pula berbeda-beda satu sama lainnya. Di Indonesia saja misalnya, dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada pada tahun 2004, presentase yang memberi suara adalah kira-kira 50%. Presentasi ini hanya berubah sedikit pada pemilihan umum selanjutnya. Pada tahun 2009 yang memberikan suara 57,7% dan pada pemilihan umum 2014 presentase yang memberikan suaranya naik menjadi dari 80%. Melihat jumlah pemilih, tepatlah jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang lumayan besar di dunia.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai partisipasi politik diluar pemberian suara dalam pemilihan umum dilakukan oleh Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Dari hasil penelitiannya yang dituangkan dalam karya klasik *civic culture* di temukan beberapa hal yang menarik.

---

<sup>4</sup>*ibid*, hal.286

<sup>5</sup> David F. Roth dan Frank L. Wilson, 1976. *The Comparative Study of Politics*, ed ke-2, (Boston: Houghton Mifflin Company), hlm. 159

Dibanding dengan warga di beberapa negara otoriter di dunia, orang Korea Utara tidak terlalu bergairah untuk pemilihan umum<sup>6</sup>.

### **PARTISIPASI POLITIK DI NEGARA OTORITER (KOREA UTARA)**

Di Negara-Negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik.

Terutama, presentase partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum di anggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar presentase pemilihan mencapai angka tinggi. Korea utara adalah salah satu negara yang mencapai persentase *voter turnout* yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum angka partisipasi selalu mencapai angka diatas 99%. Akan tetapi perlu diingat bahwa sistem pemilihan umumnya berbeda dari sistem di negara Demokrasi, terutama karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan, dan para calon itu harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis.

Partisipasi politik di luar pemilihan umum dapat juga dibina melalui organisasi-organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi-organisasi kebudayaan. Melalui pembinaan yang ketat potensi masyarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat *community action* terutama di Korea utara sangat intensif dan luas, melebihi kegiatan serupa di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi ada unsur *mobilized participation* di dalamnya, karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh partai.

Negara-negara otoriter yang sudah mapan seperti Korea utara menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Jika kontrol dikendorkan untuk

---

<sup>6</sup> *ibid*, hal.371

meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya bahwa akan timbul konflik yang mengganggu stabilitas<sup>7</sup>.

## **ANALISA PERBANDINGAN PARTISIPASI POLITIK DI NEGARA DEMOKRASI DAN OTORITER**

Jika kita lihat partisipasi politik di Negara Demokrasi seperti Indonesia dan Partisipasi politik di negara Otoriter seperti Korea Utara dan apa kaitannya dengan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia sungguh sangat jauh berbeda baik dari segi sistem ataupun kelangsungan partisipasi itu sendiri. Karna partisipasi di negara Demokrasi adalah dirayakan dengan sangat begitu bebasnya dan tanpa adanya paksaan dari pemerintah untuk memilih salah satu golongan atau partai saja.

Melainkan partisipasi di Indonesia dirayakan dengan bebas bahkan dijadikan ajang untuk bersaing bagi partai-partai yang ada di Indonesia, karna seperti kita ketahui Partai politik adalah salah satu kekuatan politik dari segi Infrastruktur politik. Maka adanya partai politik yang bebas adalah penting bagi berjalannya perpolitikan di Indonesia karna sebagai penyeimbang dari kekuatan-kekuatan politik yang lainnya. Selain itu juga partisipasi politik yang berlangsung di negara Indonesia juga merupakan kerelaan dari warga negaranya yang datang ketempat pemilihan untuk mengikuti pemilihan umum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka juga bebas memilih pasangan calon mana saja yang menurut mereka visi misinnya jelas dan bagus.

Selain itu juga pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum bukan hanya satu pasangan saja, melainkan bebas, pada umumnya terdapat dua pasangan calon. Berbanding tebalik dengan partisipasi di negara Demokrasi seperti di Indonesia partisipasi di negara Ototriter seperti Kora Utara kurang diminati oleh warga negaranya, karna mereka harus dihadapkan hanya pada satu pasangan saja, kebanyakan pasangan calon itu adalah rezim otoriter yang telah berkuasa sebelumnya. Warga negara juga dipaksa atau terpaksa untuk melakukan partisipasi politik, karna mau tak mau mereka hanya akan memilih pasangan yang sudah dipikirkan oleh partai komunis yang berkuasa di negaranya.

Selain itu partai politik di negara Otoriter tidak bisa disebut sebagai kekuatan-kekuatan politik, karna kebanyakan partai politik di negara otoriter adalah berloyalitas

---

<sup>7</sup> *op-cit*, hal.379

penuh terhadap rezim otoriter atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik yaitu sebagai sosialisasi politik dan partisipasi politik, partai yang ada di negara otoriter adalah partai buatan rezim otoriter itu yang telah berlangsung lama di Korea Utara.

Jadi analisisnya adalah partisipasi yang dilakukan di Indonesia lebih layak disebut sebagai partisipasi politik yang bebas, dan juga partai politik bisa menjalankan fungsinya sebagai kekuatan-kekuatan politik dengan baik, sebaliknya partisipasi politik yang dilakukan di negara otoriter lebih bersifat memaksa dan kebanyakan tidak dijalankan sepenuh hati oleh warga negaranya, partai politiknya juga tidak menjalankan fungsinya sebagai kekuatan politik dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi politik di negara Demokrasi seperti Indonesia dan partisipasi di negara Otoriter sangat berbeda sistem dan pelaksanaannya, selain itu parpol yang terlibat juga berbeda dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan-kekuatan politik. Partai yang berada di negara Demokrasi masih menjalankan tugasnya sebagai sarana sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutment politik, dan kontrol politik sehingga masih bisa dibidang menjalankan tugasnya sebagai salah satu kekuatan politik dari segi Infrastruktur politik sebaliknya parpol yang ada di negara Otoriter hanya ada satu dan bersifat menjadi rezim otoriter di negara-negara otoriter seperti Korea Utara.

Partisipasi politik juga adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

## **SARAN**

Menurut saya, Partisipasi yang ada di Indonesia sudah sangat bagus karena dari istemnya yang bebas dan tertutup masyarakat juga dapat dengan bebas memilih pemimpin yang mereka suka. Yang harus lebih di tingkatkan lagi oleh warga negara Indonesia adalah berperan aktif dalam hal berpartisipasi dibidang politik, dengan aktif dan tidak pasif, karena dengan begitu kita bisa membantu pembangunan politik di Indonesia dengan cara ikut memilih pemimpin yang baik untuk memimpin negara kita dan bukan menjadi warga negara yang apatis. Untuk itu diperlukan SDM-SDM yang berintelektual

yang tinggi untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, hal itu juga dibutuhkan campur tanga dari masyarakat dalam hal ikut berpartisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Rahman, A. 2007. "*Sistem Politik Indonesia*" (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Budiarjo, Miriam. 2007. "*Dasar-dasar Ilmu Politik*" (Jakarta: Gramedia)

Gaffar, Affan, 2005. "*Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*", (Pustaka Pelajar: Yogyakarta)

F. Roth, David dan Frank L. Wilson, 1976. "*The Comparative Study of Politics*", (Boston: Houghton Mifflin Company)